

## RINGKASAN

**Herna Safrida. Mekanisme Revisi Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Dosen Pembimbing: Endro Sugiartono, S.E., M.M.**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi perbendaharaan di daerah. Salah satu tugas penting Kanwil DJPb adalah melakukan pembinaan, supervise, serta pengasahan revisi anggaran pada satuan kerja (satker) agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran I (PPA I) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan magang tersebut secara langsung dapat terlibat dalam proses bisnis perbendaharaan negara, khususnya mekanisme revisi anggaran pada satuan kerja, mulai dari pelayanan konsultasi satker, pemeriksaan dan pemrosesan usulan revisi anggaran, pengelolaan PNBPN, dan Hibah, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Mekanisme revisi anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan pengajuan usulan oleh satker, verifikasi dan penelaahan oleh Kanwil DJPb, pengesahan sesuai kewenangan, serta penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah direvisi.

Dalam pelaksanaannya, proses revisi anggaran masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterlambatan satker dalam mengajukan usulan revisi, ketidakeengkapan dokumen pendukung, serta ketidaksesuaian format usulan dengan ketentuan PMK Nomor 62/PMK.01/2016 dan PER-9/PB/2023. Permasalahan tersebut sering dipicu oleh perencanaan anggaran yang kurang matang, perubahan kebijakan pemerintah, serta keterbatasan pemahaman sumber daya manusia satker terhadap ketentuan dan kewenangan revisi anggaran.

Dampak dari kendala tersebut dapat memengaruhi penyerapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang selanjutnya berdampak pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan permasalahan tersebut mekanisme revisi anggaran masih memerlukan koordinasi baik antar satker dengan Kanwil DJPb, peningkatan pemahaman regulasi yang memadai, serta ketepatan waktu dalam pengajuan usulan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas proses revisi anggaran antara lain melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, peningkatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada satker, serta pemanfaatan system informasi perencanaan dan penganggaran secara optimal, salah satunya dengan penyusunan *flowchart* revisi anggaran sebagai media pemahaman alur proses revisi anggaran.